

Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Membangun Kerangka Pengambilan Keputusan Berbasis Data untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasarkan Uu No. 20 Tahun 2003 Pasal 3

Panius Zagoto¹, Erni Murniarti²

^{1,2} Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia

e-mail: paniuszagoto@gmail.com

Abstrak

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3. Dalam era digital saat ini, pengambilan keputusan berbasis data menjadi krusial untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, implementasi kebijakan pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan di Indonesia dan membangun kerangka pengambilan keputusan berbasis data yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, artikel, buku, dan laporan resmi dari lembaga terkait yang membahas kebijakan pendidikan, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data memiliki potensi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi yang efektif memerlukan pengembangan infrastruktur data, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik, serta peningkatan koordinasi dan transparansi antar pihak terkait. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan data dalam pengambilan keputusan pendidikan dapat membawa dampak positif yang signifikan.

Kata kunci: *Kebijakan Pendidikan, Pengambilan Keputusan Berbasis Data, Mutu Pendidikan.*

Abstract

Education is the main pillar in nation building which aims to brighten the nation's life and develop abilities and form a dignified national character and civilization, as mandated by Law no. 20 of 2003 Article 3. In the current digital era, data-based decision making is crucial for improving the quality of education. However, the implementation of education policies often faces various challenges such as limited resources and coordination between related parties. This research aims to analyze education policy in Indonesia and build a data-based decision-making framework that can be used to improve the quality of education in accordance with Law no. 20 of 2003 Article 3. The research method used is a qualitative method with a literature study approach. Secondary data sources used in this research include journals, articles, books, and official reports from related institutions that discuss education policy, the use of data in decision making, and evaluation of education policy. The research results show that data-based decision making has great potential in improving the quality of education. Effective implementation requires developing data infrastructure, training and capacity building for teaching staff, as well as increasing coordination and transparency

between related parties. Case studies from various countries show that the use of data in educational decision making can have a significant positive impact.

Keywords: *Education Policy, Data Based Decision Making, Education Quality.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Di Indonesia, kebijakan pendidikan diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam menciptakan individu yang cerdas, kompeten, dan berkarakter (Azwardi, 2021).

Namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah kerangka pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Dalam era digital dan informasi saat ini, pengambilan keputusan berbasis data menjadi semakin krusial. Data memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan akurat. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan yang mendalam dan terstruktur sangat dibutuhkan untuk membangun kerangka pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 dapat tercapai.

Pengambilan keputusan dalam pendidikan adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak dan aspek, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, hingga peserta didik dan orang tua. Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, proses pengambilan keputusan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan akses pendidikan, dan kualitas pendidikan yang belum merata (Ridwan, 2024). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pendekatan berbasis data menjadi solusi yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendetail tentang kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Data memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang objektif dan akurat. Dalam konteks pendidikan, data dapat mencakup berbagai aspek, seperti angka partisipasi sekolah, tingkat kelulusan, pencapaian akademik, serta kondisi fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Dengan menggunakan data, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, mengevaluasi efektivitas program-program pendidikan, dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Penggunaan data juga memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan sehingga kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan (Suriono, 2022).

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum utama bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Pasal 3 undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan individu secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa untuk mencakup aspek-aspek tersebut. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali menghadapi berbagai hambatan (Sobri & Umar, 2022). Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan data yang akurat dan relevan. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data pendidikan yang memadai. Selain itu, ada juga tantangan dalam koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tanpa adanya data yang valid dan mekanisme koordinasi yang baik, pengambilan keputusan sering kali

didasarkan pada asumsi atau informasi yang tidak lengkap, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan strategi yang holistik dan komprehensif. Salah satu strategi utama adalah membangun sistem pengumpulan dan pengolahan data yang handal dan terintegrasi. Ini mencakup pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan tenaga pendidik dan pengelola data, serta implementasi kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dalam analisis data sehingga data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan zaman. Dengan membangun kerangka pengambilan keputusan berbasis data, diharapkan kebijakan pendidikan di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Penggunaan data yang tepat tidak hanya membantu dalam identifikasi masalah dan evaluasi program, tetapi juga dalam merancang kebijakan yang lebih tepat dan berdampak. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan yang bermutu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber informasi yang relevan, yang mencakup kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi berbagai temuan dan pandangan yang telah dipublikasikan mengenai topik ini. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai perspektif teoretis dan praktis yang diperlukan untuk membangun kerangka pengambilan keputusan yang komprehensif dan berbasis data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, artikel, buku, serta laporan resmi dari lembaga terkait. Jurnal-jurnal dan artikel yang dianalisis mencakup publikasi yang membahas kebijakan pendidikan, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia dan negara-negara lain. Buku-buku yang menjadi referensi meliputi karya-karya yang membahas teori dan praktik dalam manajemen pendidikan dan analisis kebijakan (Sunardi et al., 2019). Selain itu, laporan-laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, serta organisasi internasional seperti UNESCO dan World Bank juga digunakan sebagai sumber data untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual. Data sekunder ini dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan pendidikan serta untuk merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pasal 3 undang-undang ini menekankan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan yang holistik. Implementasi dari pasal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, dimana semua aspek Pendidikan mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, infrastruktur, hingga manajemen dan evaluasi harus dikelola secara efektif. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang berbasis data menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dan

diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Data dapat memberikan informasi yang objektif dan akurat mengenai berbagai aspek pendidikan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat dan efektif (Pramungkas, 2020).

Pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) adalah proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat sasaran. Dalam konteks pendidikan, data dapat mencakup berbagai indikator seperti tingkat partisipasi siswa, kualitas guru, hasil belajar siswa, serta kondisi fasilitas Pendidikan (Anggreini & Priyoadmiko, 2022). Dengan menggunakan data ini, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, mengevaluasi efektivitas program-program yang sedang berjalan, serta merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Salah satu contoh penting dari penerapan pengambilan keputusan berbasis data adalah dalam pengembangan kurikulum. Data mengenai pencapaian akademik siswa dan umpan balik dari guru serta orang tua dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan (Asyari, 2020). Misalnya, jika data menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran tertentu, maka kurikulum dapat disesuaikan untuk memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya pada mata pelajaran tersebut. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kualitas pendidikan di berbagai daerah, sehingga dapat dilakukan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Meskipun pengambilan keputusan berbasis data memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan dan kualitas data. Di banyak daerah di Indonesia, sistem pengumpulan dan pengolahan data masih belum memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya pelatihan dan kesadaran mengenai pentingnya data. Masalah koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan juga menjadi tantangan tersendiri. Pengumpulan dan pengolahan data memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta berbagai lembaga pendidikan lainnya. Tanpa adanya koordinasi yang baik, data yang diperoleh bisa jadi tidak konsisten atau tidak lengkap, sehingga mengurangi keandalan dan akurasi dari analisis yang dilakukan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat dan tantangan pengambilan keputusan berbasis data, berikut adalah beberapa studi kasus dari implementasi kebijakan pendidikan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, banyak sekolah telah mengadopsi sistem instruksional berbasis data untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya, di beberapa distrik sekolah, data mengenai hasil ujian siswa dianalisis untuk mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan. Berdasarkan analisis ini, guru kemudian dapat merancang rencana pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Program ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan data untuk menginformasikan praktik pengajaran mereka (Powell et al., 2024).

Singapura memiliki sistem informasi manajemen pendidikan (EMIS) yang sangat maju, yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai aspek pendidikan, mulai dari partisipasi siswa, kinerja akademik, hingga kondisi infrastruktur sekolah. Data ini digunakan oleh Kementerian Pendidikan untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif. Misalnya, data mengenai kinerja akademik siswa digunakan untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan intervensi tambahan, seperti pelatihan bagi guru atau peningkatan fasilitas sekolah. Di Indonesia, salah satu inisiatif yang menggunakan data untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan tunai. Data mengenai penerima bantuan dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Meskipun program ini masih menghadapi berbagai

tantangan, penggunaan data dalam perencanaan dan pelaksanaan program telah membantu meningkatkan akurasi dan efektivitas dari bantuan yang diberikan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan untuk membangun kerangka pengambilan keputusan berbasis data yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia:

1. **Pengembangan Infrastruktur Data**
Perlu dilakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pendidikan. Ini mencakup penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta jaringan internet yang stabil dan luas.
2. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**
Tenaga pendidik dan pengelola data perlu mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi.
3. **Koordinasi dan Kolaborasi**
Perlu ada mekanisme yang lebih baik untuk koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ini akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten dan dapat diandalkan.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data perlu diterapkan. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam penggunaan data untuk pengambilan keputusan.
5. **Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan**
Penggunaan data dalam pengambilan keputusan harus disertai dengan evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Ini akan memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan kebijakan secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini akan membantu mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

SIMPULAN

Analisis kebijakan pendidikan dalam membangun kerangka pengambilan keputusan berbasis data merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi masalah secara lebih akurat, mengevaluasi efektivitas program-program pendidikan, dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pengumpulan dan penggunaan data, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar pihak, upaya peningkatan infrastruktur data, pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini.

Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan data dalam pengambilan keputusan pendidikan dapat membawa dampak positif yang signifikan. Implementasi yang berhasil memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, mulai dari

pemerintah pusat hingga sekolah-sekolah di daerah. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang adaptif, responsif, dan berkualitas tinggi. Pada akhirnya, kerangka pengambilan keputusan berbasis data tidak hanya akan membantu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, tetapi juga dalam membentuk generasi yang lebih cerdas, kompeten, dan berkarakter. Upaya ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendorong dan mendukung penggunaan data dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan, sebagai wujud nyata dari komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, D., & Priyojadmiko, E. (2022). Peran Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Merdeka Belajar untuk Meningkatkan Pembelajaran Matematika pada Era Omricon dan Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2022*, 1(1), 75–87.
- Asyari, S. (2020). Supervisi Kepala Madrasah Berbasis Penilaian Kinerja sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.35719/jieman.v2i1.14>
- Azwardi, U. R. W. (2021). Evaluasi Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Pengembangan Profesionalisme Guru. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2, 55–65. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i3.227>
- Powell, R., Schultz, J., Harvey, R., & Meaux, A. (2024). Maximizing Student Outcomes in Schools: Data-Driven Individualized Education Program Goals and Objectives Aligned to the Standards. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 55(2), 303–322. https://doi.org/10.1044/2023_LSHSS-23-00082
- Pramungkas, P. R. (2020). Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Information Communication Technology (Ict) Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Siswa Di Lingkungan Pesantren. *AFKARINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 1–18. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/afkarina/article/view/1402/663%0Ahttps://ejournal.unuja.ac.id/index.php/afkarina/article/view/1402>
- Ridwan, A. (2024). Peran Komite Sekolah Dalam Menyongkong Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan. *Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 13–23. <http://dx.doi.org/10.47662/hibrul-ulama>
- Sobri, M., & Umar. (2022). Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(2), 6174–6181. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunardi, S., Nugroho, P. J., & Setiawan, S. (2019). Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah. *Equity In Education Journal*, 1(1), 20–28. <https://doi.org/10.37304/eej.v1i1.1548>
- Suriono, Z. (2022). Analisis SWOT dalam Identifikasi Mutu Pendidikan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(20), 94–103. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i3.50>